



Annual Report 2016
INDONESIA CORRUPTION WATCH

MENYEMAI SEMANGAT ANTIKORUPSI





**KITA
MELAWAN
RUPSI**

**KITA
MELAWAN
KORUPSI**

Danang dan Darto,
dua artis ibukota
beri dukungan pada
gerakan antikorupsi

Sumber foto: Dokumentasi ICW

Sumber foto: Dokumentasi ICW

Sebagian aktivis dan sahabat ICW jelang buka puasa ramadhan di sekretariat ICW



Jl. Kalibata Timur 4D No 6 Kalibata, Jakarta Selatan
Tlp : 021.790.1885 / 799.4015
Fax : 021.799.4005
w : www.Anti.korupsi.org
e : sahabaticw@antikorupsi.org
t : [@sahabaticw](https://www.instagram.com/sahabaticw)/[@Antikorupsi](https://www.instagram.com/antikorupsi)
f : Sahabat ICW
ig : Sahabat ICW

Tetap Menuai Dukungan

Masyarakat Indonesia kian sadar bahwa korupsi adalah sesuatu yang kronik dan berbahaya. Media sosial adalah salah satu rujukan dimana kecaman terhadap pejabat publik yang berperilaku menyimpang muncul silih berganti. Sesungguhnya ini pertanda baik. Masyarakat yang kritis adalah masyarakat yang mampu mengontrol kekuasaan dari kesewenang-wenangan dan korupsi. Salah satu yang bisa dijadikan contoh adalah gelombang protes yang diakumulasikan dalam gerakan petisi online. Ratusan ribu orang ikut menandatangani petisi “SaveKPK”. Bukan hanya isu korupsi, publik juga kian kritis dengan isu-isu sosial dan politik lainnya.

ICW tentu senang dengan fenomena ini. Mengapa? Karena dengan demikian, publik kian mendukung gerakan anti korupsi. Dukungan itu telah dibuktikan dalam berbagai macam bentuk. Kampanye dan advokasi menolak revisi UU KPK menuai banyak solidaritas. Bahkan ratusan guru besar dari berbagai kampus di Indonesia ikut serta dalam mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan revisi UU KPK.

Dukungan tak berhenti *disitu*. Para pesohor, baik kalangan artis, pemusik, komedian, perupa, seniman dan kalangan profesional juga mendukung gerakan anti korupsi. Mereka mengekspresikan sikap anti-korupsinya dalam berbagai bentuk. Salah satunya mendukung kampanye anti-korupsi dan program *public fundraising* yang dilakukan ICW. Najwa Sihab, Slank, Eddi Brokoli, J-Flo, Pangeran Siahaan, Vincent & Desta, Marissa Anita, Melanie Subono, Efek Rumah Kaca, Budiman Sudjatmiko, Sandy Pas Band, Happy Salma dan lain sebagainya adalah contoh dari para pemilik nama besar yang mendukung ICW.

Bukan hanya dari kalangan tersohor saja dukungan datang. Mereka yang berlatar belakang profesional seperti pengajar,

jurnalis, editor, kalangan swasta seperti pengusaha, pegawai swasta maupun kalangan ibu rumah tangga dan mahasiswa serta pelajar menjadi supporter tetap ICW. Dari mereka mengalir dukungan finansial bagi pemberdayaan dan penguatan program anti korupsi.

Dukungan publik yang kian luas menyiratkan satu hal, bahwa masyarakat geram dan marah dengan korupsi yang merajalela. Dukungan publik tentu tak boleh disia-siakan. ICW berusaha konsisten dan istiqomah dalam gerakan anti korupsi, dan serius menjalankan fungsi kontrol dan peran lainnya yang relevan. Pelaporan kasus korupsi, monitoring kinerja penegakan hukum korupsi, penelusuran rekam jejak calon pejabat publik, pengawasan dana kampanye, reformasi kebijakan pendanaan partai politik, pengawasan tata kelola sektor ekstraktif dan pajak, penyediaan instrumen pengawasan publik, penyelenggaraan Sekolah Anti korupsi (SAKTI), dan berbagai program kolaborasi dengan lembaga pemerintah atau aktor tertentu di pemerintahan yang menaruh perhatian dan kemauan melawan korupsi telah dilakukan.

ICW mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan yang telah diberikan. Gerakan anti korupsi memang hanya bisa dipertahankan dengan dukungan aktif dari masyarakat luas.

Salam anti korupsi!!!

Menanam Bibit Anti korupsi



Masyarakat Indonesia untuk sementara bisa bernafas lega karena Presiden Jokowi dan Ketua DPR menyatakan menunda pembahasan revisi UU KPK. Tuntutan dan tekanan yang kita lakukan membuahkan hasil, termasuk gerbong guru besar dari berbagai kampus di Indonesia yang ikut serta mengetuk pintu istana, meminta agar Presiden tak gegabah mengubah UU KPK. Suara yang riuh itu didengarkan, dan sampai saat ini, kita bisa menyaksikan kiprah KPK dalam pemberantasan korupsi. Hasilnya pun bisa dikatakan cukup mengejutkan karena operasi tangkap tangan (OTT) demi OTT dilakukan. Para penerima suap dan pemberinya banyak yang mulai dicokok KPK.

Tapi kita tentu juga sadar bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya bicara mengenai KPK. Banyak dimensi yang harus dikelola dan diawasi, termasuk kerja pemberantasan korupsi aparat penegak hukum lainnya. Dalam ritme yang sama, kita bisa berharap program pemberantasan korupsi bisa berjalan lebih efektif. ICW melakukan upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas kerja penegakan hukum melalui publikasi rutin bernama tren korupsi. Sebuah analisa dan kajian untuk melihat dan menilai kinerja penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Pada aspek yang lain, kita tentu juga percaya bahwa generasi yang kritis menjadi modal penting bagi kuatnya fungsi pengawasan sosial masyarakat atas kekuasaan. Oleh

karena itu, membangun basis kekuatan masyarakat sipil, terutama fokus pada generasi mudanya adalah keharusan. ICW dengan dukungan banyak pihak konsisten menggarap Sekolah Anti korupsi (SAKTI) sebagai media untuk mencetak generasi muda anti korupsi. Modul pembelajaran SAKTI kini banyak diadopsi oleh kelompok masyarakat sipil anti-korupsi di berbagai wilayah di Indonesia, misalnya di Tangerang Selatan, Aceh, Mataram, Pontianak dan lain-lain.

Disamping itu, berbagai kesempatan dan peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengintervensi perubahan dan mendorong sistem yang lebih imun terhadap korupsi terus digarap ICW. Pengembangan opentender.net sebagai aplikasi berbasis internet untuk mengawasi proses lelang diharapkan dapat menyediakan informasi dan data yang lebih kredibel. Opentender.net kini menjadi salah satu rujukan bagi kerja-kerja investigasi jurnalis. ICW juga membuka tangan atas ajakan Menteri Perhubungan untuk menjadi bagian dari tim saber pungli. ICW berharap, kontribusi ICW dalam gerakan anti-korupsi tetap signifikan.

Kalibata, Desember 2016

Adnan Topan Husodo
Koordinator ICW





Tiga peserta lomba mewarnai dalam peluncuran album anti korupsi untuk anak-anak berjudul "Lagu Anak Hebat" di Mataram, Nusa Tenggara Barat

Sumber foto: Dokumentasi ICW

AKA2

Anugerah Karya
Jurnalistik Antikorupsi



Penerima penghargaan Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi (AKJA) 2016 berpose dengan Ade Irawan, Wakil Koordinator ICW.

Sumber foto: Dokumentasi ICW

Daftar Isi



Tetap Menuai Dukungan **5**

Kata Pengantar: Menanam Bibit Anti korupsi **6**

Daftar Isi **9**

Ringkasan Laporan **10**

Bangga Menjadi Generasi Anti-Korupsi **12**

Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi, Sebuah Rekomendasi untuk Apgakum **18**

Menggagalkan Upaya Pelemahan KPK **22**

Banten Bersih: Mengawasi Pemerintah Agar Tidak Kotor **26**

Kampanye Anti Korupsi Melalui Media Sosial **30**

Mainstreaming Isu Korupsi Kehutanan **34**

SAKTI sebagai Instrumen Mencetak Kader Anti korupsi **38**

ICW Masuk Peringkat Dunia Think Thank **47**

Laporan Keuangan ICW Tahun 2016 **48**

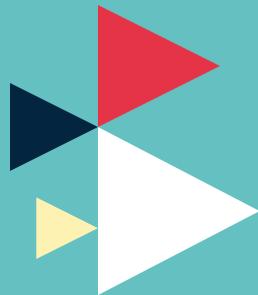


Konsistensi dan kreativitas dalam melahirkan gagasan baru adalah hal terpenting dalam gerakan sosial anti korupsi. ICW dituntut untuk bisa memiliki kedua hal itu secara bersamaan agar gerakan anti korupsi bisa terus dijaga. Demikian pula, pengabdian pada capaian visi dan misi organisasi selalu menjadi prioritas dan menjadi spirit perjuangan melawan korupsi. Selama tahun 2016, ICW berusaha keras untuk memenuhi capaian misi operasional yang telah ditetapkan, sembari tetap memberikan ruang fleksibilitas untuk dapat merespon isu-isu aktual, baik pada level nasional maupun lokal.

Secara umum, capaian ICW pada 2016 bisa dibagi ke dalam beberapa isu utama, yakni mainstreaming gerakan anti korupsi pada sektor kehutanan, perluasan jejaring anti korupsi, penguasaan dan penggunaan media sosial sebagai sarana memperluas gaung kampanye anti korupsi, advokasi kebijakan publik dan penguatan internal organisasi.

Mengarusutamakan isu anti korupsi pada sektor kehutanan merupakan strategi perang melawan korupsi di sektor sumber daya alam. Agenda pelatihan investigasi dan pelaporan kasus korupsi sektor kehutanan bagi delapan mitra kerja ICW adalah pendekatan yang dipilih. Sepanjang 2016, sebagai hasil dari pelatihan investigasi itu, kurang lebih 18 laporan investigasi telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun responnya belum seperti yang diharapkan.

Dalam konteks jejaring anti korupsi, ICW fokus memperkuat jaringan anti korupsi di Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi yang menjadi prioritas kerja penindakan dan pencegahan KPK pada 2016. Ayo Banten dan Banten Bersih adalah koalisi yang lahir dan dipersiapkan untuk mengawal agenda reformasi di Pemerintah Provinsi Banten. Literasi politik bagi pemilih, pengawasan Pilkada Banten 2017 dan perlawanan terhadap fenomena dinasti politik di Banten yang cenderung koruptif serta pelaporan kasus-kasus dugaan korupsi di Banten merupakan agenda kerja koalisi yang telah dilakukan.



Konsistensi dan kreativitas dalam melahirkan gagasan baru adalah hal terpenting dalam gerakan sosial anti korupsi.

Untuk mendukung kerja koalisi, ICW membekali mereka dengan kemampuan dalam menggunakan media sosial, kampanye melalui media massa, pembuatan infografis, pembuatan meme dan agenda *public fundraising* untuk memperluas keterlibatan publik di Banten. Tak hanya Banten, ICW juga mendukung berbagai kerja pelatihan dan pengayaan pengetahuan serta kemampuan teknis di berbagai daerah, dengan jejaring anti korupsi yang berlainan.

Tak lupa, penguatan internal organisasi melalui berbagai macam skema pelatihan juga dilakukan, mulai dari penguatan kemampuan bahasa Inggris, kemampuan *fundraising* yang meliputi strategi packaging, artikulasi produk seperti merchandise, dan kemampuan copy writer. Sementara dalam konteks penelitian, penguatan dilakukan pada desain metodologi penelitian, penyusunan SOP penelitian dan alur penelitian. Semua agenda penguatan ini dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan ICW sebagai organisasi yang mampu menghadapi tantangan baru yang kian kompleks.

Namun demikian, dinamika di luar juga tetap tak bisa ditinggalkan. ICW fokus pada agenda membatalkan rencana politisi untuk merevisi UU KPK. Menggandeng para guru besar dari berbagai kampus di Indonesia hingga mencapai 150-an, kerja advokasi untuk mempertahankan eksistensi KPK mendapatkan hasil yang baik, karena Presiden Jokowi dan Ketua DPR, Ade Komarudin menunda pembahasan revisi UU KPK yang sarat muatan politisnya. Kerja pemberantasan korupsi di Indonesia memang tak cukup memuaskan, hal itu karena sektor politik tidak banyak mendukung, bahkan cenderung menggembosinya. Namun demikian, ICW dan elemen masyarakat sipil lainnya akan selalu berada pada posisi melawan upaya-upaya apapun yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.***



Keceriaan anak-anak para peserta lomba mewarnai di Museum Nasional, Jakarta

Sumber foto: Dokumentasi ICW

BANGGA MENJADI GENERASI ANTI KORUPSI

Diskusi dengan anak muda dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Dunia 2016, di Historia Cafe, Kota Tua, Jakarta

Sumber foto: Dokumentasi ICW



Regenerasi dan peningkatan kapasitas individu adalah dua isu penting di ICW. Bisa dibayangkan, ICW diisi oleh banyak aktivis dari generasi muda. Salah satunya di divisi public *fundraising*, divisi yang menjadi tulang punggung ICW untuk program donasi publik, sekaligus sebagai pusat kampanye penyadaran anti korupsi. Divisi inilah yang juga menginisiasi berbagai macam produk (merchandise) yang digunakan sebagai media kampanye dan sosialisasi, dan secara bersamaan mendorong kesadaran publik dalam mendukung gerakan anti korupsi melalui program donasi publik.

Semangat yang menyala dan kemauan untuk belajar membuat proses peningkatan kapasitas individu di ICW menjadi lebih mudah. Program capacity building yang didukung oleh DANIDA juga menyoroti divisi public *fundraising*. Peningkatan skill *photography*, *copy writing*, *packaging* produk merchandise dan strategi pemasaran dan pemanfaatan media sosial seperti twitter, instagram dan facebook menjadi fokus area pengembangan kemampuan staf.

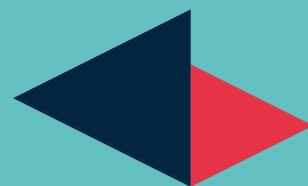
Hasilnya cukup menggembirakan karena donasi publik dari penjualan merchandise meningkat 100 persen, produk merchandise semakin kreatif, penyusunan pesan anti korupsi pada produk merchandise yang makin baik, dan meningkatnya jumlah followers pada akun twitter @SahabatICW yang mencapai



“Saya sangat senang bisa bergabung dengan ICW dan diberi kesempatan untuk terus belajar berbagai macam hal, baik apa yang saya sukai maupun mempelajari hal-hal baru lainnya”



Nisa Rizkiah
staf Divisi Penggalangan Dana Publik ICW

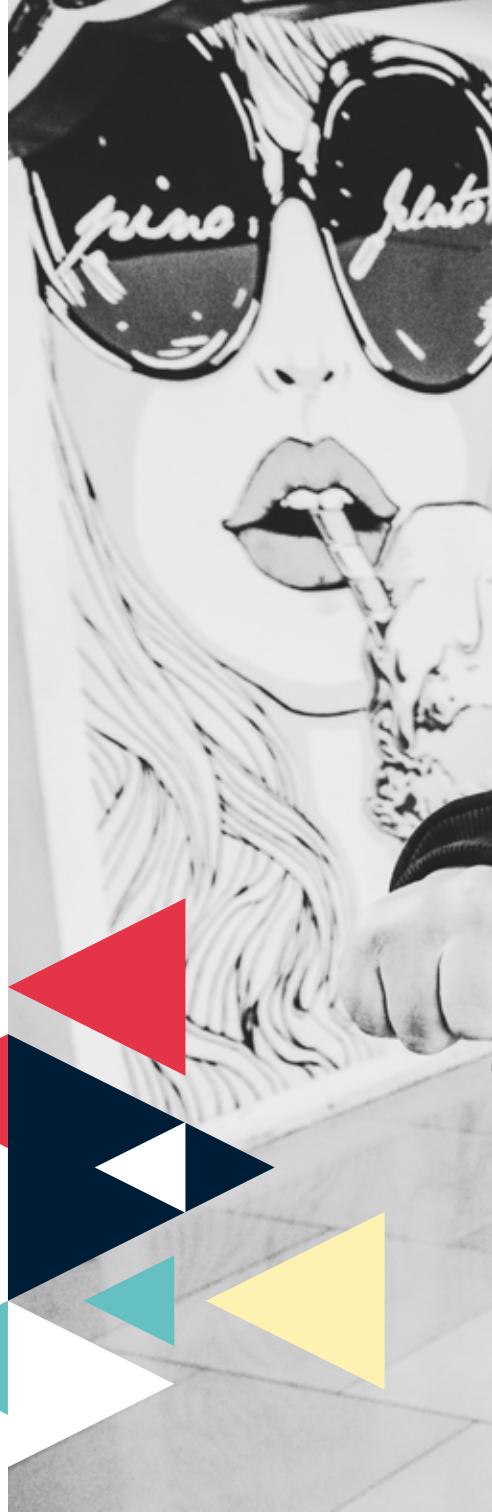


34 ribu pada tahun 2016. Selain itu, kerja sama program donasi publik juga makin meluas, diantaranya dengan komunitas hobi dan BUMN seperti PT KAI dan Ruang Rupa (RuRu).

Demikian pula ICW mengajak para pesohor untuk terlibat langsung dalam kampanye anti korupsi. Kurang lebih 23 public figures berkomitmen mendukung gerakan anti korupsi. Mereka berasal dari kalangan artis, musisi, jurnalis, tokoh masyarakat, pejabat negara, akademisi & seniman. Di antaranya adalah SLANK, Budiman Sudjatmiko, Najwa Shihab, Pangeran Siahaan, J-Flo, Sandi PAS BAND, Danang&Darto, dan Vincent&Desta.

Selain divisi public fund raising, divisi riset juga melakukan pengayaan kemampuan penelitian dan analisis terhadap isu tertentu yang sedang dan akan ditangani serta peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Hasilnya pun cukup memuaskan karena staf divisi riset memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup memadai sehingga sumber bacaan dan referensi mereka semakin luas. Pemahaman terhadap metodologi riset, terutama mix method juga berkembang, sekaligus pemahaman mengenai alur penelitian.

Semua capaian di atas dapat dikatakan telah menunjang pencapaian misi internal lembaga dimana ICW berupaya untuk membentuk individu/staf yang memiliki prinsip anti korupsi, berkualitas dari sisi kemampuan dan keterampilan, kompeten, berintegritas, dan memiliki perspektif keadilan sosial dan gender.





Personel PAS BAND,
Sandi mendukung
gerakan antikorupsi

Sumber foto: Dokumentasi ICW

#JANGANBUNUHKPK

57
RIBU

HENTIKAN
REVISI
UU KPK

CHANGE.ORG/JANGANBUNUHKPK

Petisi online seperti Change.org telah menjadi instrumen penting dalam upaya melawan pelemahan KPK

Sumber foto: Dokumentasi ICW



**KINERJA PENYELIDIKAN
APARAT PENEGAK HUKUM
SELAMA TAHUN 2016**

Dari Penyelidikan ke Penyidikan

- ▶ Jumlah Kasus Korupsi
482 KASUS KORUPSI
- ▶ Jumlah Tersangka
**1.101 TERSANGKA
KASUS KORUPSI**
- ▶ Nilai Kerugian Negara
RP 1,47 TRILIUN
- ▶ Nilai Suap
RP 31 MILIAR

Tren Penegakan
Hukum Kasus Korupsi
**SEBUAH
REKOMENDASI
UNTUK
APGAKUM**

**ANCAN
RDEK...KAN
ORUPTOR**

**“KAMI”
MENDUKUNG
REMISI
KORUPTOR**

Para aktivis antikorupsi gelar aksi teatral sindir pemerintah yang akan memberikan remisi bagi terpidana korupsi

Sumber foto: Dokumentasi ICW

Setiap satu semester ICW merilis hasil pemantauan penanganan kasus korupsi di Indonesia. Hasil pemantauan itu ada dua, tren penegakan hukum kasus korupsi oleh aparat penegak hukum yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu ICW juga mengeluarkan hasil pemantauan yaitu tren vonis pengadilan kasus korupsi.

Tren penegakan hukum kasus korupsi adalah sebuah pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi selama satu semester (6 bulan). Yang dianggap sebagai kasus korupsi dalam hal ini adalah semua kasus korupsi setelah ada penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum atau sudah masuk tahapan penyidikan.

Selain itu juga sebagai perbandingan dilakukan pemantauan terhadap kasus-kasus korupsi yang sudah dilakukan penyidikan sejak beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengawalan penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum sekaligus untuk melihat kinerja aparat penegak hukum. Misalnya apakah ada kasus-kasus yang dihentikan penanganannya oleh aparat penegak hukum pasca dimulainya penyidikan. Bahkan juga untuk melihat berapa lama rata-rata aparat penegak hukum melakukan penanganan kasus korupsi.

Performa kinerja aparat penegak hukum ini biasanya akan diperbandingkan dengan anggaran yang diterima oleh masing-masing institusi. Hasil analisisnya tentu saja akan menjadi sebuah rekomendasi bagi aparat penegak hukum dan institusi lain yang mempunyai irisan kepentingan dengan persoalan ini. Seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), dan Komisi Kejaksaan. Sepanjang tahun 2016 ICW juga merilis dua kali tren penegakan

hukum kasus korupsi ini. Hasil pemantauan semester I dirilis bulan September 2016 dan untuk semester II didiseminasikan ke publik pada bulan Januari 2017.

Pada semester I tahun 2016 mengutip hasil pemantauan tren penegakan hukum kasus korupsi ini baik di KPK, Kejaksaan maupun di Kepolisian masih meninggalkan ada banyak kasus yang tidak tertangani dengan tuntas. Ada kasus yang cukup lama ditangani dan tidak ada perkembangan penanganan. Ada yang tidak jelas juga proses penanganannya. Kasus-kasus yang tidak jelas penanganannya ini dominan terjadi di Kepolisian dan Kejaksaan.

Setelah hasil pemantauan ini dirilis ke publik, rupanya cukup efektif sebagai upaya untuk “menekan” aparat penegak hukum untuk memperbaiki kinerjanya. Meskipun banyak yang membantah data pemantauan ICW ini, namun secara umum data ini masih dipakai untuk rujukan oleh aparat penegak hukum. Pasca rilis hasil pemantauan semester I, data ini membuat gusar Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri. Akhirnya pihak Bareskrim Polri “mengutus” Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) untuk mengundang ICW hadir dalam forum pertemuan. Di acara ini Kopolnas juga sekaligus diminta Bareskrim untuk melakukan klarifikasi dan sinkronisasi data.

Kemudian Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung juga sempat mengundang ICW untuk melakukan pertemuan dan melakukan sinkronisasi data. Bahkan sempat muncul kesepakatan dibuat pertemuan bersama secara periodik, meskipun rencana itu belum terlaksana hingga sekarang.

KASUS KORUPSI YANG MASUK TAHAP PENYIDIKAN TAHUN 2016

BERDASARKAN JENIS KORUPSI



Aksi Tangkap Monster
Mafia Hukum di depan
KPK

Sumber foto: Dokumentasi ICW



Jumlah Kasus :
238 Kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara :
Rp 1 triliun



SUAP MENYUAP

Jumlah Kasus :
33 Kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara :
Rp 32,4 Miliar



GRATIFIKASI

Jumlah Kasus :
2 Kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara :
Rp -



PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Jumlah Kasus :
3 Kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara :
Rp 2,3 Miliar



BENTURAN DALAM PBJ

Jumlah Kasus :
2 Kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara :
Rp-



PEMERASAN

Jumlah Kasus :
7 Kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara :
Rp 20,5 Miliar



BELUM DIKETAHUI

Jumlah Kasus :
197 Kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara :
Rp 442 Miliar

MENGGAGALKAN UPAYA PELEMAHAN KPK

Dukungan Slank
untuk KPK

Sumber foto: Dokumentasi ICW



▶▶
“Saya setia mendukung ICW karena ingin melihat Indonesia bersih dari korupsi. ICW memiliki modal untuk menyebarkan virus anti korupsi di Indonesia.”
◀◀

Prof. Hikmawanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D,
Guru Besar Hukum Internasional Universitas
Indonesia; Supporter ICW

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri 2003 lalu, upaya pelemahan terhadap lembaga ini datang silih berganti dan dengan berbagai cara. Salah satu yang menonjol adalah melalui proses penyusunan regulasi (legislasi) dengan cara melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Revisi UU KPK).

Sejak 2011 upaya merevisi UU KPK sudah mulai digagas. Upaya melakukan revisi UU KPK makin agresif dilakukan pemerintah dan DPR pada tahun 2015. Tercatat 3 (tiga) kali upaya pembahasan Revisi UU KPK dilakukan yaitu pada Juni, Oktober dan Desember 2015.

Pada naskah Revisi UU KPK per 2015, ICW mencatat sedikitnya terdapat 17 (tujuh belas) hal krusial yang berpotensi melemahkan KPK. Beberapa diantaranya adalah pembatasan usia KPK hanya 12 tahun, memangkas kewenangan penuntutan, memberikan kewenangan penghentian penyidikan, mereduksi kewenangan penyadapan, membatasi proses rekrutmen penyidik hingga membatasi pemanganan kasus korupsi.

Jika Revisi UU KPK disahkan, maka tidak saja KPK yang terancam namun juga agenda pemberantasan korupsi di negeri ini. Beruntung akibat banyak penolakan, proses pembahasan Revisi UU KPK gagal dilaksanakan hingga penghujung tahun 2015.

Gagalnya upaya pelemahan KPK melalui Revisi UU KPK tidak bisa dilepaskan dari sejumlah aktivitas Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama dengan berbagai elemen masyarakat. Aktivitas tersebut antara lain aksi, diskusi dan penyikapan bersama, menggalang dukungan publik melalui petisi penolakan Revisi UU KPK, dan melakukan audiensi dengan pihak yang berkepentingan.

Serangkaian aksi ICW bersama Koalisi antara lain Aksi Satir peletakan batu pertama "Pembangunan Museum KPK" pada 8 Oktober 2015, menyambut Hari Anti korupsi Internasional 9 Desember digelar aksi di depan DPR berupa pemasangan spanduk (banner) raksasa sebagai bentuk kritik terhadap DPR



yang berusaha memperlemah KPK melalui revisi UU KPK. Terakhir adalah aksi pemberian karangan bunga duka cita di depan Gedung KPK pada 17 Desember 2015.

Diskusi dan pernyataan sikap dengan melibatkan media tentang Revisi UU KPK secara rutin dilakukan selama tahun 2015. Audiensi untuk mendorong penolakan terhadap pelemahan KPK juga dilakukan misalnya dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (Februari 2015), Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah (September 2015) dan perwakilan Partai Demokrat (Oktober 2015).

Untuk menggalang dukungan publik, ICW bersama Bagus Suryo (alumni Sekolah Anti korupsi ICW) mengkampanyekan petisi online "Jangan Bunuh KPK, Hentikan Revisi UU KPK". Hingga akhir Desember 2015 petisi ini sudah ditandatangani oleh sedikitnya 50 ribu orang. Meskipun pada tahun 2015 upaya pelemahan terhadap KPK berhasil digagalkan namun pengawalan dari berbagai kalangan tetap harus dilakukan. Hal ini karena proses legislasi Revisi UU KPK ternyata tidak berhenti namun justru terus berlanjut hingga tahun 2016.

Januari 2016, sebanyak 150 Guru Besar lintas kampus menggalang dukungan penolakan revisi UU KPK. Mereka mengirimkan surat penolakan revisi UU KPK kepada Presiden

Jokowi sebagai masukan dari kalangan akademisi. Akhirnya di 22 Februari 2016, Presiden Jokowi menyatakan sikap pemerintah untuk menunda pembahasan revisi UU KPK.

“Saya hargai proses dinamika politik yang ada di DPR, khususnya dalam rancangan revisi UU KPK. Mengenai rencana revisi UU KPK tersebut, kami bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini,” ujar Presiden Jokowi.***



TOLAK
REVISI
UU KPK

Aksi menolak revisi
UU KPK di depan
gedung DPR/MPR

Sumber foto: Dokumentasi ICW

Banten Bersih:
**MENGAWASI
PEMERINTAH
AGAR TIDAK
KOTOR**



♥ 10.000 likes
ayobanten Ayo Cerdas Memilih,
Ayo Selamatkan Banten.
#ayobanten

Pengunjung dalam
festival Ayo Banten

Sumber foto: Dokumentasi Ayo Banten



“Dengan keunikan isu masing-masing, mereka terus bergerak memberdayakan masyarakat. Tapi pada sisi lain, mereka juga tidak lupa untuk mempengaruhi pemerintah.”

Sujanarko
Direktur Dikyanmas KPK



Pada 2016, ICW bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemetaan sekaligus penguatan komunitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di tujuh daerah prioritas KPK, termasuk Provinsi Banten.

Pemetaan dilakukan untuk mendapat gambaran mengenai kondisi umum LSM dan komunitas di Banten, termasuk kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan mereka. Adanya komunitas dan LSM yang kuat akan menjadi modal penting untuk memperkuat fungsi kontrol sosial.

Berdasarkan data dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banten, tercatat 1.423 LSM dan komunitas yang terdaftar. Namun sebagian besar tidak mencerminkan keberdayaan masyarakat sipil. Faktanya banyak yang fiktif, seperti tidak ditemukan alamat maupun kegiatan yang telah mereka lakukan. Temuan lain, LSM ‘milik’ politisi atau pengusaha yang dibentuk dengan tujuan menampung proyek atau bantuan dari pemerintah, serta mengganggu lawan politik.

Paling banyak adalah LSM ‘tukang peras’. Sasaran mereka Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) atau unit layanan pemerintah seperti sekolah. Modusnya mencari celah masalah,

menakut-nakuti dengan menggunakan berbagai aturan, dan mengaku jaringan ICW atau KPK, atau mengancam akan mempublikasi masalah di media yang mereka miliki.

Hanya ada lima belas lembaga, LSM dan komunitas yang memenuhi kriteria terutama terkait integritas. ICW dan KPK mengajak mereka dalam pertemuan konsolidasi untuk membahas agenda bersama. Dalam pertemuan konsolidasi pertama dipaparkan masalah dan kebutuhan konkret masing-masing lembaga serta kesepakatan membentuk jaringan Banten Bersih.

Banten Bersih tidak mengambil alih gerakan yang telah dilakukan masing-masing lembaga anggota, tapi sebaliknya untuk saling memperkuat. Menjadi tempat belajar sekaligus melakukan advokasi bersama. Agenda bersama yang disepakati adalah kampanye anti-korupsi dan tolak dinasti.

Banten Bersih membuat petisi tolak korupsi dan dinasti dalam pilgub 2017, melakukan kampanye di berbagai forum seperti car free day. Menyerahkan petisi ke KPK sekaligus audiensi mengenai perkembangan penanganan kasus korupsi di Banten.

Agenda bersama lainnya adalah penguatan pendanaan melalui penggalangan dana publik. Setelah pelatihan dan pendampingan, dua lembaga anggota Banten Bersih yaitu Truth Tangerang dan Nalar Pandeglang sudah berhasil mendapat penyumbang rutin walau jumlahnya masih terbatas.

Agenda bersama Banten Bersih yang masih berjalan adalah mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten periode 2017-2022. Banten Bersih membentuk organ taktis bernama Ayo Banten. Setidaknya ada seratus pemantau

yang terlibat. Sebelum melakukan pemantauan, mereka dilatih mengenai pemahaman pilkada, aturan-aturan terbaru, politik uang dan cara pemantauannya.

Hingga awal Desember 2016, sudah 184 temuan pelanggaran yang dilaporkan Ayo Banten ke pengawas pemilu (panwas kab/kota dan bawaslu). Selain pemantauan, Ayo Banten pun terus melakukan sosialisasi terkait pilkada yang berintegritas di beberapa daerah seperti Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Serang, dan Pandeglang.

Menurut Direktur Dikyanmas KPK, Sujanarko jaringan Banten Bersih bisa dijadikan sebagai contoh baik bagi kelompok masyarakat sipil lainnya. Mereka tidak hanya memberdayakan masyarakat, tapi lebih jauh mempengaruhi sekaligus menjadi penyeimbang pemerintah. "Dengan keunikan isu masing-masing, mereka terus bergerak memberdayakan masyarakat. Tapi pada sisi lain, mereka juga tidak lupa untuk mempengaruhi pemerintah.", ujar Sujanarko.***



“Saya ingin menjadi pemantau Ayo Banten karena saya ingin menyadarkan masyarakat Banten atau sekitar saya, bagaimana pentingnya memilih pemimpin yang benar, jujur, amanah, dll, yang bisa membawa Banten kahiji (nomor satu).”

Pemantau Ayo Banten Cilegon
Rosihan Anwar



Anak muda beri dukungan kepada gerakan Ayo Banten

Sumber foto: Dokumentasi Ayo Banten

Annual Report CW 2017

39

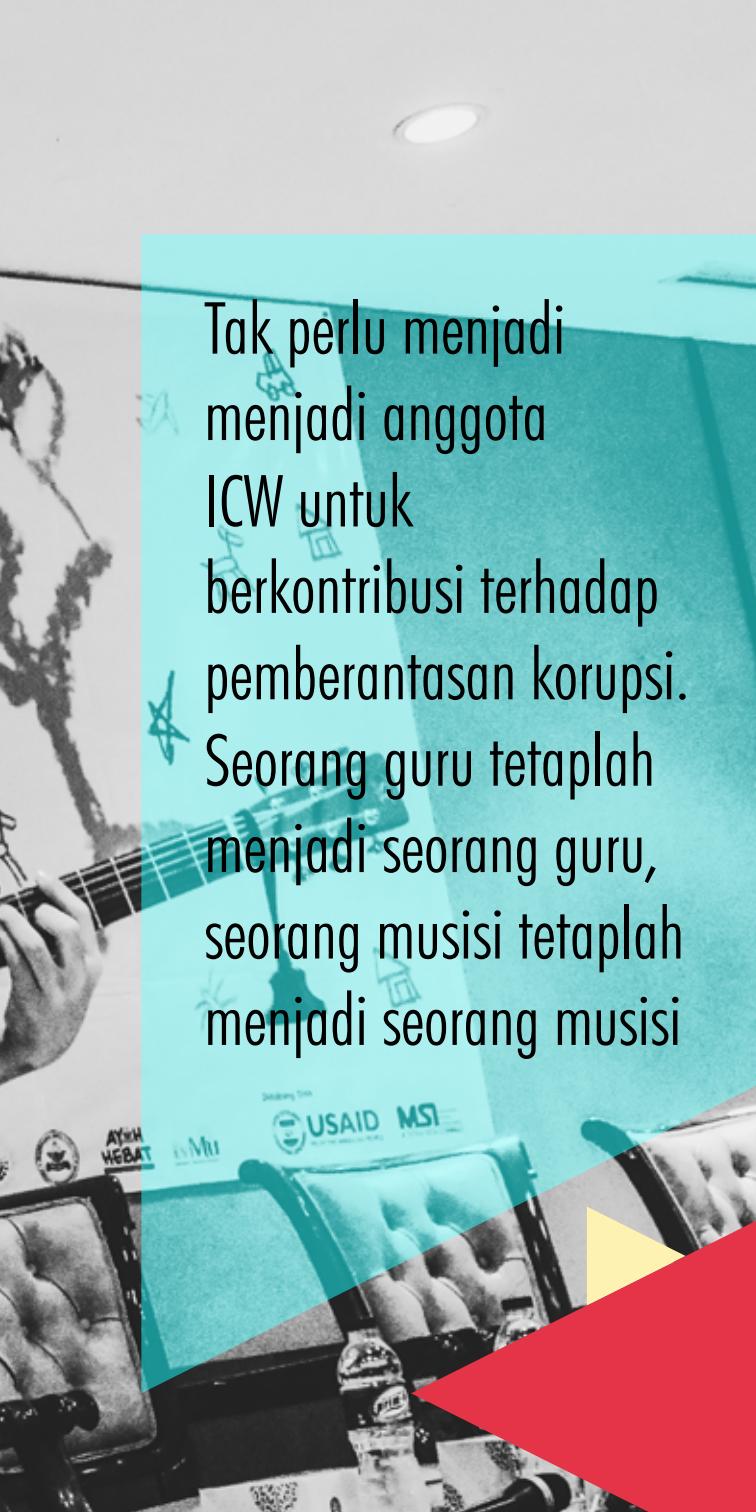
KAMPANYE ANTI KORUPSI MELALUI MEDIA SOSIAL

Album Anak Antikorupsi

GUANAK
EAT

Pendidikan Anti korupsi bisa disampaikan lewat berbagai macam media, salah satunya musik.

Sumber foto: Dokumentasi ICW



Tak perlu menjadi
menjadi anggota
ICW untuk
berkontribusi terhadap
pemberantasan korupsi.
Seorang guru tetaplah
menjadi seorang guru,
seorang musisi tetaplah
menjadi seorang musisi

Melesatnya pengguna sosial media pada era modern, menuntut ICW segera beradaptasi dengan pola kampanye yang baru. Tahun 2016 menjadi ruang praktikum bagi ICW, untuk menguji seberapa efektif dan strategis penggunaan media sosial dalam menyebarkan nilai-nilai anti korupsi di masyarakat.

Media sosial tidak hanya dipandang sebagai saluran baru untuk menampilkan materi kampanye, tetapi juga media untuk berkolaborasi bersama dengan agen pemberantasan korupsi lainnya. Misalnya seperti musisi, jaringan anti korupsi dan lembaga pemerintah. Pada tahun 2016, ICW menggunakan beberapa platform media sosial, diantaranya twitter, facebook, instagram, youtube dan petisi di www.change.org.

Penggunaan media sosial ICW sendiri menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sepanjang tahun 2016 ada banyak capaian yang bisa dijadikan bahan pelajaran. Khusus di twitter, materi kampanye yang diproduksi oleh ICW sering kali menjadi trending topic. Diantaranya tagar Hari Anti Korupsi 2016 (#HAKI2016), Tagar Hutan Lestari Tanpa Korupsi, Tagar Lagu Anak Hebat (#LaguAnakHebat), Tagar Guru Anti Korupsi (#GuruAnti korupsi), dan Tagar Tolak Remisi Koruptor (#TolakRemisiKoruptor).

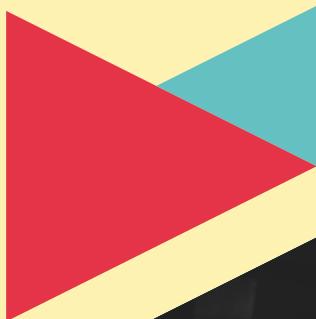
Tagar Tolak Remisi Koruptor merupakan kampanye yang paling berhasil ICW melalui media sosial. Tidak hanya masuk dalam daftar trending topic, tetapi juga mampu mendesak pemerintah Jokowi untuk menolak revisi peraturan pemerintah, yang melonggarkan pemberian remisi terhadap koruptor. Keberhasilan ini ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya karena terbangun relasi antara gerakan kampanye online (menggunakan media sosial twitter dan petisi), dengan gerakan advokasi offline seperti konferensi pers dan aksi di jalanan.

Konten kampanye media sosial bertajuk pemberantasan korupsi lintas generasi, mampu mengajak musisi-musisi tanah air di berbagai genre dan generasi untuk berkontribusi dalam gerakan pemberantasan korupsi. Para musisi tersebut berkontribusi lewat lagu, yang terkompilasi dalam album frekuensi perangkap tikus 2. Sampai dengan tahun 2016, sudah 18 musisi tanah air terlibat dalam kegiatan kampanye ini, diantaranya, Ebiet G. Ade dan Navicula.

Ide berantas korupsi lintas generasi juga mampu menysar upaya penanaman nilai anti korupsi sejak dini melalui lagu anak hebat. Yaitu album kompilasi lagu anak-anak, yang menceritakan tentang sembilan nilai anti korupsi. Kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keseranian, dan keadilan. Dampak lainnya, gagasan ini mampu membentuk simpul keluarga anti korupsi di delapan daerah.

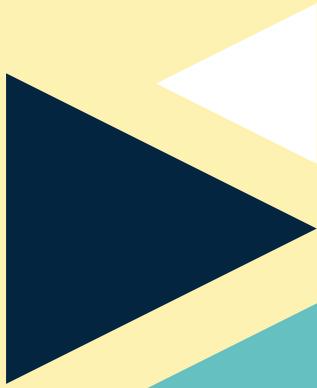
Daya jangkau kampanye melalui musik ini cukup luas, tidak hanya bertengger di deretan trending topic, tapi juga masuk dalam pemberitaan media televisi nasional dan radio secara berulang. Pengaruh kampanye media sosial membuat beberapa media televisi *mainstream* menayangkan produk kampanye ini secara eksklusif.

Kampanye media sosial ICW mengajak gerakan anti korupsi ke paradigma yang baru. Tak perlu menjadi menjadi anggota ICW untuk berkontribusi terhadap pemberantasan korupsi. Seorang seorang guru tetaplah menjadi seorang guru, seorang musisi tetaplah menjadi seorang musisi, namun semangat nilai anti korupsi selalu menjadi agenda kampanye yang mereka lakukan secara sadar dan sukarela dalam aktivitas kesehariannya.***



Aksi panggung OM PSP menyanyikan lagu karya mereka yang masuk dalam album "Frekuensi Perangkap Tikus"

Sumber foto: Dokumentasi ICW



“ICW dan Pemuda Muhammadiyah sudah hampir 2 tahun melakukan kampanye melalui media sosial tidak terkecuali Gerakan #AyahHebat #PemudaMuhammadiyah. Kampanye kolaboratif melalui media sosial ini sangat membantu untuk memperbesar gaung gerakan yang telah dicanangkan oleh Pemuda Muhammadiyah. Kedepannya, kami berharap agar kolaborasi pengelolaan media sosial ini dapat terus diperkuat dengan mengajak teman-teman gerakan/organisasi lainnya agar gerakan masyarakat sipil bertambah jamaahnya”

Andik Setiawan
Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah



MAINSTREAMING ISU KORUPSI SEKTOR KEHUTANAN

Sumber foto: Dokumentasi CIFOR

Bencana asap di Sumatera juga berdampak pada anak-anak, aktivitas bermain mereka terhambat akibat asap tebal.



Kutukan sumber daya alam tak hanya terjadi di negara di Afrika, namun juga Indonesia. Negara yang berlimpah kekayaannya terjerat pada kemiskinan struktural yang cukup parah. Jurang yang kaya dan miskin kian menganga. Menurut harian Bisnis Indonesia (24 September 2016), rasio gini penguasaan tanah di Indonesia pada 2016 mendekati angka 0,58 atau 1% penduduk berkuasa atas 59% sumber daya agraria, tanah dan ruang.

Korupsi adalah salah satu penyebabnya. Ijin yang mudah diberikan kepada pengusaha sektor kehutanan banyak dipicu oleh praktek suap kepada pejabat publik, baik di pusat dan daerah. Perusahaan raksasa sektor kehutanan dan anak perusahaan mereka semakin leluasa menguasai lahan hutan karena mudahnya mendapatkan ijin. ICW mendorong adanya mainstreaming isu korupsi di sektor kehutanan sejak 2012 lalu atas dukungan dana dari The Asia Foundation. Hal ini menimbang bahwa advokasi sektor kehutanan sebelumnya lebih banyak terfokus pada isu ancaman kekayaan hayati, penyelamatan habitat asli, kerusakan lingkungan serta bencana alam. KPK sendiri pada 2015 mulai menempatkan isu SDA sebagai isu prioritas.

Pada 2016, ICW mulai menyebarkan penggunaan modul investigasi korupsi sektor kehutanan pada berbagai pihak, diantaranya delapan NGO lokal yang tersebar di berbagai daerah dan jurnalis. ICW juga mendorong pelaporan kasus-kasus korupsi sektor kehutanan, baik yang dilakukan sebagai inisiatif lembaga, maupun menjadi *hub* bagi NGO lokal untuk melaporkan kasus korupsi sektor kehutanan pada lembaga penegak hukum yang ada. Kurang lebih 18 laporan dugaan korupsi sektor kehutanan telah disampaikan kepada penegak hukum. Namun sayangnya respon penegak hukum masih sangat lamban. Faktanya, hanya KPK yang rajin mendorong proses hukum korupsi sektor kehutanan.

Pemerintahan Jokowi sendiri mulai merespon dan melihat pentingnya perbaikan kebijakan sektor kehutanan, terutama karena masalah kerusakan lingkungan yang parah, kebakaran hutan yang kerap terjadi, menajamnya angka rasio gini pertanahan (termasuk penguasaan lahan hutan), sekaligus karena respon atas tekanan internasional karena hutan adalah paru-paru dunia. Sikap Pemerintah sendiri tampak cukup jelas, mengeluarkan kebijakan moratorium ijin sawit, mengingat bisnis sawit adalah salah satu pemicu terbesar dari alih fungsi lahan hutan di Indonesia. Meski demikian, perjuangan untuk mendorong gerakan anti korupsi di sektor kehutanan masih banyak tantangannya, terutama pada itikad penegak hukum yang belum cukup tampak.***

FAKTA-FAKTA SEPUTAR SEKTOR KEHUTANAN DI INDONESIA

Indonesia menempati urutan ketiga dalam hal deforestasi dengan laju deforestasi

498 RIBU HA/TAHUN

(Forest Resource Assesment, 2010)

Kerugian dari penerimaan negara yang tidak dibayar sejak tahun 2003–2014 mencapai

7,24 TRILIUN/TAHUN

(KPK, 2015)

Sumber foto: Dokumentasi ICW

Aktivis ICW gelar aksi teatral di depan Gedung KY sekaligus melaporkan hakim yang memberi vonis bebas pada perusahaan pembakar hutan



SAKTI

Sebagai Instrumen Mencetak Kader Anti korupsi

Kegiatan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) yang diselenggarakan Masyarakat Transparansi (MaTA) Aceh, di Banda Aceh, NAD

Sumber foto: Dokumentasi ICW



“Santri Anti korupsi terinspirasi dari Sekolah Anti korupsi ICW. Ini adalah sebuah proses pengkaderan kelompok masyarakat sipil Anti korupsi di NTB.”

Dwi Aris Santo
SOMASI NTB



Hadirnya Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) merupakan salah satu prioritas kerja ICW untuk memperluas gerakan anti korupsi. Selain sebagai wahana kaderisasi aktivis anti korupsi, program dan kurikulum yang dirancang SAKTI dapat dipergunakan oleh berbagai pihak, khususnya jaringan/mitra strategis ICW. Kurikulum dan materi SAKTI seperti Pengantar Teori Korupsi, Penegakan Hukum, Strategi Investigasi, Analisa Anggaran Publik, dan Strategi Advokasi Kebijakan Publik dirumuskan dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman, analisa dan strategi advokasi serta semangat aktivisme untuk melahirkan individu yang berkomitmen dalam gerakan anti korupsi.

SAKTI dan kurikulumnya telah diadopsi oleh beberapa jaringan ICW. Misalnya lembaga TRUTH di Tangerang Selatan telah membuat SAKTI Tangerang Selatan, di Nusa Tenggara Barat terbentuknya SANTRI (Pesantren Anti korupsi) yang dinisiasi oleh SOMASI, dan di Kalimantan Barat jaringan anti korupsi (GEMAWAN) mendesain hal serupa dengan nama SAKSI. Di Aceh, MaTa Aceh membuat SAKTI tapi dikhususkan sebagai mata kuliah di FISIP UNSYIAH.



Digunakannya SAKTI dan kurikulumnya memudahkan kerja jaringan ICW yang ada di berbagai daerah dalam menjalankan proses kaderisasi. Selain itu, ICW juga memberikan kontribusi pada proses fasilitasi dan menjadi pemateri dalam pelaksanaan SAKTI di daerah sehingga turut memperkuat muatan dan fokus materi yang disampaikan.

Selain itu, berkembangnya minat beberapa daerah untuk menyelenggarakan SAKTI yang serupa dengan ICW, SAKTI dan kurikulum yang telah disusun ICW bisa menjadi standar dan kualifikasi yang langsung dapat digunakan jaringan ICW maupun kelompok anti korupsi lainnya dalam pelaksanaan kaderisasi maupun upaya perluasan jaringan anti korupsi.***



“Karya ini dibuat berdasarkan respect dari tujuan ICW untuk memberantas korupsi di Indonesia. Mudah-mudahan dengan sumbangan desain ini bisa membantu ICW dalam menjalankan program-program untuk anak muda Indonesia dan membangun kesadaran anti korupsi.”

The Popo
Street Artis

Sumber foto: Dokumentasi ICW

PENDAPATAN FUNDRAISING TAHUN 2016



AUTODEBET

RP278.650.546



TRANSFER

RP59.773.002



PENJUALAN MERCHANDISE

RP126.840.000

TOTAL RP465.263.548





“Nobodycorp. sedari awal didirikan memang bertujuan mengkampanyekan perubahan sosial, politik dan budaya melalui poster. Poster mudah dibuat oleh siapa saja. Bertujuan memicu perdebatan dan tanggapan atas isu yang dikampanyekan melalui poster. Karenanya karya-karya Nobodycorp. berlisensi Creative Commons (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International) sehingga setiap orang maupun kelompok dapat menyebarluaskan, menggunakan sebagai bahan agitasi dan propaganda, dan juga aksi fundraising untuk kepentingan kampanye isu yang diusung.”



Alit Ambara
Nobodycorp



“Saya hanyalah pekerja seni & desain yg mayoritasnya mengolah visual. Hanya melalui kerja sama rilisan merchandise yang melibatkan pekerja seni inilah sekiranya saya bisa membantu gerakan anti korupsi. Dari kita, oleh kita, untuk kita.”

Iky
Seniman







Kegiatan *family gathering* yang dilakukan oleh staf ICW

Sumber foto: Dokumentasi ICW

ICW Masuk Peringkat Dunia “Think Tank”



The Lauder Institute of the University of Pennsylvania, USA kembali merilis Global Think Thank Index 2016. Terdapat empat kategori top think tank yang digunakan untuk menyusun index, yakni top think tanks skala global, top think tanks berdasarkan region, top think tanks berdasarkan area riset, dan top think tanks berdasarkan capaian khusus. Top Transparency and Good Governance Think Tanks menjadi bagian atau sub-kategori top think tanks berdasarkan area riset.

Beberapa hal yang diukur untuk menyusun Global Top Think Tanks Index adalah kualitas dan komitmen dari pimpinan lembaga, kualitas dan reputasi para staf, kualitas dan reputasi atas hasil analisis dan penelitian yang dilakukan, kemampuan dalam melibatkan ahli dan akademisi bereputasi besar dalam berbagai kajian, dampak yang dihasilkan dari penelitian atau program yang dikerjakan bagi pengambil keputusan dan aktor pembuat kebijakan lainnya, kemampuan menyusun dan menghasilkan produk penelitian yang independen, kemampuan mengakses para tokoh kunci di pemerintahan, kemampuan meyakinkan pengambil keputusan dan tokoh kunci di pemerintahan untuk membangun kerja sama, semua output dan produk yang dihasilkan organisasi/lembaga, kegunaan dari produk yang dihasilkan untuk kepentingan advokasi, keterlibatan publik dan penelitian, reputasi di media massa, kemampuan manajemen dan organisasi yang baik, pengaruh atau dampak program yang dikerjakan kepada masyarakat luas, dan lain sebagainya.

The Lauder Insistitute melibatkan kurang lebih 2,543 informan kunci yang terdiri dari akademisi, jurnalis, pejabat publik, peneliti independen dan lembaga donor dari berbagai belahan dunia serta 900 ahli dan spesialis. Sementara itu, terdapat 6.846 think tanks dari seluruh penjuru dunia, baik yang ada di Benua Afrika, Asia, Eropa, Australia, Amerika Utara dan Latin yang dinilai oleh tim dari the Lauder Institute.

Dalam laporan yang telah dikeluarkan pada Januari 2017, Indonesia Corruption Watch (ICW) menempati posisi 20 dunia dari 63 lembaga think tanks untuk kategori Top Good Governance and Transparency Think Tanks. Sementara pada level Asia untuk kategori yang sama, ICW menduduki peringkat 2 setelah Development Alternatives dari India. Pada tahun sebelumnya (2015), ICW menduduki posisi 22 dunia, yang artinya ada kenaikan 2 peringkat pada tahun 2016 kemarin.

Untuk laporan lengkap Global Think Tanks Index 2016, dapat diunduh di website: http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=think_tanks

Laporan
Keuangan ICW
Tahun 2016*



AKTIVA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Aktiva Lancar | |
| Kas dan setara kas | Rp. 11.811.353.695 |
| Piutang karyawan | Rp. 1.021.166.191 |
| Uang muka & beban dibayar di muka | Rp. 408.766.044 |
| Piutang program | Rp. 1.251.091.613 |
| Jumlah aktiva lancar | Rp. 14.492.377.542 |
| Aktiva tetap | |
| Harga perolehan | Rp. 1.219.695.785 |
| Akumulasi penyusutan | Rp. (1.015.486.125) |
| TOTAL AKTIVA | Rp. 14.696.587.202 |

KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Kewajiban | |
| Kewajiban lancar | Rp. 721.555.437 |
| Total kewajiban | Rp. 721.555.437 |
| Aktiva bersih | |
| Tidak terikat | Rp. 11.375.382.882 |
| Terikat kontemporer | Rp. 2.599.648.883 |
| Total aktiva bersih | Rp. 13.975.031.765 |
| TOTAL KEWAJIBAN DAN AKTIVA | Rp. 14.696.587.202 |

PENERIMAAN

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Dana dari grantor | Rp. 8.575.468.857 |
| Dana tidak terikat | Rp. 4.780.702.525 |
| Total penerimaan | Rp. 13.356.171.382 |

PENGELUARAN

| | |
|---|----------------------------|
| Program | Rp. 12.918.031.889 |
| Dana tidak terikat | Rp. 4.800.531.162 |
| Total pengeluaran | Rp. 17.718.563.050 |
| Kenaikan/(penurunan) Aktiva Bersih | Rp. (4.362.391.668) |

List Program dan Donor ICW Tahun 2016



| No | PROGRAM | DONOR | NILAI |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | a. Membangun Gerakan Berjamaah Melawan Korupsi Melalui Madrasah Anti-Korupsi b. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Tahun 2016 | AIPJ (Cardno) | Rp. 1.020.108.463 |
| 2 | Pemetaan Politik Bisnis Anggota DPR RI Periode 2014-2019 | TIFA | Rp. 516.128.064 |
| 3 | Program Kajian Regulasi Pendanaan Partai Politik di Indonesia | IFES | Rp. 627.950.946 |
| 4 | a. Anti-Corruption Family b. Community Mapping Database for Anti-Corruption Mobilization c. Mapping Community Mini Research d. Strengthened the CSO capacity to support stronger corruption prevention effort | MSI | Rp. 1.419.964.774 |
| 5 | Tackling Corruption in Coal Industry | European Climate Foundation | Rp. 554.849.202 |
| 6 | AIPJ | The Asia Foundation | Rp. 66.995.942 |
| 7 | Improving the Governance of Land Use, Land Use Change, and Forestry (LULUCF) in Indonesia Through Civil Society Participation | The Asia Foundation | Rp. 1.330.270.021 |
| 8 | Penggunaan UU Pencucian Uang dan UU Pajak dalam Sektor Kehutanan di Indonesia | ULU Foundation | Rp. 35.801.016 |
| 9 | Core Support to ICW Strategic Plan 2014-2018 | DANIDA | Rp. 996.698.249 |
| 10 | Strengthening capacity of citizen to engage government in procurement monitoring and evaluation using open data analysis and spatial data visualization | HIVOS | Rp. 953.125.435 |
| 11 | a. Strengthening the Indonesian Anti-corruption Commission's (Komisi Pemberantasan Korupsi or KPK) Anti-corruption Efforts through Monitoring, Research, and Advocacy b. Strengthening Teacher Management and Even Distribution of Teachers: Advocacy to the Government Decree on Teacher Management through Submission of Civil Society's Academic Paper | PROREP | Rp. 507.198.438 |
| 12 | For support for analysis of corruption in the forestry sector and advocacy to bring cases to the anti-corruption commission | FORD Foundation | Rp. 546.378.307 |
| TOTAL | | | Rp. 8.575.468.857 |



“Bersama ICW, saya ingin memberitahu lingkungan terdekat bahwa korupsi adalah kejahatan besar.”

Eddi Brokoli
Penyanyi dan aktor; supporter ICW

Sumber foto: Dokumentasi ICW

MARI BERGABUNG MENJADI SAHABAT ICW

Kamu bisa berdonasi dengan cara autodebet/kredit atau transfer ke salah satu rekening berikut ini:

BNI 0064.3607.42 | BCA 8780.1617.37

MANDIRI 1260.0056.696.00 | BRI 0206.01.0043.0630.7

a.n Indonesia Corruption Watch



Jl. Kalibata Timur 4D No 6 Kalibata,
Jakarta Selatan
Tlp : 021.790.1885 / 799.4015
Fax : 021.799.4005
W : www.antikorupsi.org
E : sahabaticw@antikorupsi.org
T : @sahabaticw @antikorupsi
F : sahabat ICW

